

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi sekarang ini, sektor industri sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu sektor industri tersebut adalah industri perbankan. Bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir,2015) .

Saat ini tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan produk perbankan semakin meningkat, seiring meningkatnya pengetahuan atau kemajuan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya , kegiatan bank secara sederhana dapat dikatakan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum . Oleh sebab itu , kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama bisnis perbankan (Kasmir,2015) , sehingga manajemen bank harus berupaya untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan tersebut dengan cara menaati peraturan dan tidak melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*) .

Kepercayaan seringkali dijadikan senjata untuk memenangkan persaingan, karena persaingan di dunia perbankan saat ini sangatlah ketat. Keadaan tersebut ditandai dengan banyaknya bank yang ada di Indonesia baik itu bank umum ataupun bank perkreditan rakyat yang bersaing untuk menyerap dana dari masyarakat. Dalam persaingan tersebut tindakan kecurangan yang dilakukan pihak terkait bank menjadi pokok pembicaraan pada tingkat nasional, internasional,

industri, dan perusahaan jasa. Kecurangan merupakan tindakan ilegal yang dicirikan dengan manipulasi yang disengaja dan tidak dilakukan secara terang – terangan untuk memberikan manfaat dan/atau kerugian organisasi oleh orang luar atau dalam organisasi (Setiawan , 2015). Pada penelitian ini , peneliti menemukan beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat di kota Semarang . Berikut adalah kasus – kasus yang ditemukan oleh peneliti :

Tabel 1.1 Kasus Kecurangan Bank Perkreditan Rakyat

Sumber	Kasus Kecurangan
http://bisnis.com/finansial/read/20160521/90/549855/ , 21 Mei 2016	LPS telah menutup 5 Bank Perkreditan Rakyat dikarenakan pemilik atau pengelola manajemen berbuat curang.
http://viva.co.id/berita/bisnis/486267 , 5 Maret 2014	Nasabah BPR Restu Artha Makmur Semarang melaporkan bahwa BPR tersebut mengeluarkan kredit palsu sehingga merugikan dan mengakibatkan hilangnya aset nasabah.
https://radioidola.com/ojk-sebut-dua-bpr-jateng-diawasi-karena-fraud/ , 24 November 2016	OJK Jateng-DIY mencatat 2 BPR yang sedang dalam masa pengawasan tahun 2016 dikarenakan kondisi keuangan yang buruk akibat tindakan kecurangan.
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kinerja-buruk-bpr-diminta-berbenah/ , 4 Maret 2016	Kinerja buruk BPR BKK Kota Semarang yang mengakibatkan masalah kredit macet dan SDM yang kurang profesional

Sumber: data sekunder diolah,2017

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwabanyak kecurangan yang terjadi pada BPR di Semarang dimana pada umumnya sasaran BPR adalah melayani kebutuhan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, apabila kecurangan terjadi maka masyarakat tentu saja sangat dirugikan dan kredibilitas BPR akan menurun di mata masyarakat secara luas.Fenomena tersebut jika tidak mendapat perhatian

dan perubahan ke arah yang lebih baik, akan berimplikasi pada pindahnya nasabah ke Bank Perkreditan Rakyat lain atau Bank Umum karena adanya kecurangan atas tindakan internal perusahaan.

Berdasarkan kasus yang peneliti temukan, motivasi seseorang melakukan kecurangan atau fraud relatif bermacam-macam. Motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan karena adanya tiga faktor yaitu kesempatan, tekanan dan pembenaran (Setiawan, 2015). Adanya kesempatan akan membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan dimana kesempatan tersebut dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern dan asimetri informasi. Sementara tekanan dipengaruhi oleh lingkungan tempat bekerja, salah satunya adalah keadilan organisasi dalam perusahaan. Dan pembenaran dipengaruhi oleh tingkat moralitas individu untuk merasionalisasikan tindakan kecurangan. Kecurangan yang terjadi dapat diketahui membawa dampak negatif terhadap Bank Perkreditan Rakyat karena mengalami kerugian yang cukup besar yaitu kehilangan beberapa aset yang dimiliki atas tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku *fraud* tersebut.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penyimpangan dalam bentuk kecurangan (*fraud*) tersebut juga disebabkan oleh ketidakadanya ketaatan terhadap peraturan dan kebijaksanaan yang telah didirikan oleh manajemen dan pihak berwenang dari instansi yang berkaitan (Tunji, 2013). Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, hampir semua perusahaan melengkapi organisasinya dengan sistem pengendalian internal yang memadai.

Menurut Permatahati (2016), adanya suatu sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangatlah penting, antara lain untuk memberikan perlindungan

bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu, pengendalian internal juga merupakan alat pengendalian dari berbagai kegiatan perusahaan, dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik maka perusahaan dapat melaksanakan aktifitas sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Uraian tersebut didukung oleh penelitian Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa adanya sistem pengendalian internal juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah diterapkan. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalisir. Penelitian dari Herman (2013) yang menyatakan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian intern maka semakin rendah tindakan kecurangan pada perusahaan tersebut.

Ketidakseimbangan informasi antara pihak internal BPR dan eksternal BPR juga merupakan faktor yang mempengaruhi kecurangan, ketidakseimbangan arus informasi tersebut mengalir dalam BPR antara pihak manajer dengan bawahan sehingga memberikan peluang bagi karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan (Setiawan, 2015). Menurut Hendriksen dan Van Breda (2008) asimetri informasi adalah situasi ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak (agen dan prinsipal) dan, sebagai akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut seperti contohnya jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal, yang menunjukkan adanya situasi asimetri informasi, dan kepentingan kedua belah pihak berbeda,

maka agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal

Pada dasarnya apapun kasus yang terjadi, tidak hanya dalam industri perbankan tetapi di setiap organisasi harus meminimalisir adanya kesenjangan informasi yang diperoleh untuk membantu manajemen menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya sehingga mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran. Uraian tersebut didukung oleh penelitian dari Triasmara (2015) yang menyatakan bahwa semakin besar nilai asimetri informasi, semakin besar pula kecenderungan kecurangan yang mungkin terjadi . Penelitian dari Zainal (2013) yang menyimpulkan bahwa adanya asimetri didalam perusahaan akan menunjang terjadinya tindakan-tindakan kecurangan akuntansi karena dengan ketidakselarasan informasi yang dibutuhkan oleh principal dan yang disediakan oleh agen membuat manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan keuntungan bagi pribadinya dan menyebabkan perusahaan akan menderita kerugian. Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian dari Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara asimetri informasi dengan kecurangan yang dapat diartikan sebagai aliran informasi antara manajemen , pihak internal dan pihak eksternal seimbang.

Salah satu faktor lingkungan yang dapat menyebabkan tekanan pada seorang karyawan adalah mengenai keadilan organisasional dalam perusahaan, keadilan tersebut berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan reward berupa gaji dan bagaimana prosedur berkaitan dengan pengambilan keputusan (Setiawan , 2015). Jika seseorang karyawan merasakan ketidakadilan dalam dirinya, maka

akan membuat karyawan tersebut cenderung merasa tidak puas bahkan merasa tertekan. Jika hal tersebut terjadi, karyawan tersebut akan melakukan sesuatu agar dirinya puas, seperti dengan cara melakukan kecurangan. Uraian tersebut didukung oleh penelitian dari Setiawan (2015) yang menyatakan jika tingkat keadilan organisasi dalam perusahaan meningkat, maka tingkat kecurangan pada suatu BPR akan dapat diminimalisir. Penelitian dari Herman (2013) yang menyimpulkan jika keadilan dalam organisasi diterapkan dengan baik akan mengurangi motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan. Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian dari Permatahati (2016) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara keadilan organisasi dengan kecurangan sehingga apabila keadilan organisasi semakin tinggi tetap saja terdapat tindakan kecurangan.

Rasionalisasi yaitu sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dari individu karyawan untuk merasionalisasikan kecurangan. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat moralitas individu karyawan BPR di kota Semarang. Bentuk – bentuk moralitas individu terlihat dari perilaku yang diperlihatkan di dalam dunia kerja seperti jujur, bertanggung jawab dan sesuai hati nurani, ketika moralitas telah dilaksanakan tentu mutu pekerjaan yang dilaksanakan akan semakin membaik. Uraian tersebut didukung oleh penelitian dari Prawira (2014) yang berpendapat bahwa moralitas individu akan mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan. Artinya, semakin tinggi moralitas individu maka seseorang tersebut akan berusaha untuk menghindarkan diri dari kecurangan akuntansi. Penelitian Ariani (2015) yang menyatakan bahwa rendahnya moralitas individu dapat menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya dapat merusak bahkan menghancurkan organisasi.

Penelitian ini berangkat dari fenomena yang berupa kasus-kasus kecurangan (*fraud*) dalam Bank Perkreditan Rakyat di Semarang , dan masih adanya hasil – hasil penelitian terdahulu yang bertentangan . Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Setiawan (2015) namun memiliki perbedaan dimana penelitian ini menambah satu variabel bebas yaitu moralitas individu yang berdasarkan pada saran dari hasil penelitian Setiawan (2015). Serta moralitas individu merupakan kesadaran moral yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku moral dalam sebuah tindakan kecurangan .

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Semarang adalah banyaknya kasus kecurangan yang terjadi dapat diketahui dari berita yang terlihat pada tabel 1.1 .Kasus – kasus kecurangan tersebut didukung oleh hasilpenelitian dari Setiawan (2015) , Zainal (2013) , Herman (2013) , Triasmara (2015) , Permatahati (2016) , Ariani (2014) dan Prawira (2014) .Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya asimetri informasi , kurangnya keadilan organisasi , lemahnya sistem pengendalian intern dan rendahnya moralitas individu . Maka berdasarkan penelitian tersebut dapat dikembangkan pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kota Semarang ?
- b. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kota Semarang ?

- c. Apakah keadilan organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kota Semarang ?
- d. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kota Semarang.
- b. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kota Semarang.
- c. Untuk menganalisis pengaruh keadilan organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kota Semarang.
- d. Untuk menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan (*fraud*) pada BPR di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana dalam hal pengembangan ilmu khususnya dalam bidang *auditing* dan dapat digunakan untuk membantu memecahkan berbagai masalah kecurangan (*fraud*) yang ada.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Bank Perkreditan Rakyat, khususnya wacana tentang pengaruh sistem pengendalian intern, asimetri informasi, dan keadilan organisasi terhadap kecurangan (*fraud*).